



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

GEDUNG JUANDA I, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3812203 PESAWAT 7030/31; FAKSIMILI (021) 3848049
SITUS www.depkeu.go.id

KETERANGAN PERS

Perkembangan Ekonomi Makro Terkini dan APBN Tahun 2011

Jakarta, 26 Juli 2011

A. Perkembangan Perekonomian Global

1. Perkembangan pemulihan ekonomi dunia masih menghadapi risiko, terutama utang yang membebani anggaran di negara-negara maju.
 - Amerika Serikat
Momentum pemulihan ekonomi AS mulai melambat didorong oleh mulai terbatasnya kebijakan fiskal (Debt Ceiling).
Dampaknya:
Kondisi anggaran pemerintah AS terancam *default* atau gagal bayar, AS terdorong untuk melakukan pengetatan anggaran.
S&P dan Moody's telah bersiap untuk memangkas peringkat utang AS jika terjadi gagal bayar.
Risiko
Jika anggaran tidak ditambah akan menimbulkan potensi gagal bayar, sehingga akan menyebabkan perekonomian AS kembali dalam Krisis besar dan melahirkan potensi resesi kedua selama 3 tahun.
 - Eropa
Moody's memangkas peringkat utang Portugal dan Irlandia di bawah level layak investasi (*junk*). Sedangkan, Yunani kembali mendapatkan dana *bailout* kedua sekitar € 159 miliar.
2. Krisis utang Yunani, Spanyol dan Portugal diperkirakan merupakan salah satu hal yang harus diwaspadai pengaruhnya pada perekonomian dunia.
Tingkat utang ketiga negara tersebut masih relatif tinggi. Pada tahun 2011 *debt to GDP* Yunani (153,8%), Spanyol (67,3%), dan Portugal (101,7%). Tingginya tingkat utang ini menimbulkan persepsi negatif bagi investor.
3. Ada empat mekanisme transmisi di mana ekonomi suatu negara berdampak terhadap negara lain: 1) perdagangan, 2) transaksi jasa keuangan, dan 3) investasi langsung (foreign direct investment atau "FDI") dan 4) pariwisata. Dari keempat mekanisme transmisi tersebut dapat disimpulkan krisis Eropa belum berdampak signifikan terhadap perekonomian domestik.

B. Kondisi Perekonomian Domestik

1. Tertahannya aliran masuk modal asing tidak mempengaruhi laju apresiasi rupiah dan naiknya IHSG. Selama Januari-25 Juli 2011, Rupiah terapresiasi 5,25% dan IHSG mencatat kenaikan tertinggi (10,36%) di kawasan regional.
2. Pada periode Jan-Juni 2011 masih terjadi pembelian asing bersih sebesar Rp63,69T, sehingga masih berdampak pada penurunan yield SUN.
3. Inflasi Juni 0,55% (mom), sampai dengan Juni secara kumulatif 1,06% (ytd). Namun memasuki bulan Juli hingga akhir tahun risiko Inflasi perlu dicermati karena faktor musiman (Liburan Sekolah, tahun ajaran baru, puasa, lebaran, natal dan tahun baru).
4. Neraca Perdagangan pada bulan Mei 2011 mengalami surplus sebesar US\$3,5 milyar yg bersumber dari surplus komoditi non migas sebesar US\$ 3,03 milyar dan migas sebesar US\$ 0,47 milyar.
5. Ekspor non migas mencapai US\$14,2 milyar atau tumbuh sebesar 31,3%(ytd) dan impor non migas sebesar US\$ 11,2 milyar atau tumbuh sebesar 29,9% (ytd).
6. Impor barang modal mencapai US\$ 2,4 Milyar atau tumbuh 17,3% (ytd). Dari sisi penggunaan, Impor bahan baku dan barang modal masih menunjukkan trend peningkatan. Realisasi Neraca Pembayaran Q1-2011.

C. Realisasi APBN per 30 Juni 2011

1. Realisasi Pendapatan negara dan hibah s.d. Juni 2011 sebesar Rp497,0 T (45,0% dari target), naik Rp53,3 T (12,0%) dari realisasi tahun 2010
 - Penerimaan Perpajakan sebesar Rp387,6 T (45,6% dari target) atau meningkat Rp50,0 T (14,8%) dari tahun lalu, yang antara lain terdiri dari:
 - PPh Nonmigas mencapai Rp173,5 T (47,6% dari target) yang menunjukkan pertumbuhan 17,2%
 - PPN mencapai Rp112,5 T (36,0% dari target), terutama didukung dari PPN Impor yang mengalami pertumbuhan 24,7%
 - Penerimaan Cukai mencapai Rp34,8 T (55,5% dari target) atau meningkat 8,3% dari pencapaian di tahun 2010
 - Penerimaan Bea Keluar meningkat secara signifikan mencapai Rp16,5 T (324,0% dari target) sebagai dampak tingginya harga CPO Internasional
 - PNBP mencapai Rp109,3 T (43,6% dari target), yang menunjukkan peningkatan 3,2% dari pencapaian di tahun 2010
2. Realisasi Belanja negara s.d. Juni 2011 sebesar Rp442,3 triliun (36,0% dari target) yang menunjukkan peningkatan 11,8% dari realisasi belanja tahun lalu
 - Realisasi Belanja Pusat mencapai Rp259,8 T (31,1% dari target) lebih tinggi penyerapannya dari tahun 2010

- Realisasi Belanja Pegawai telah mencapai Rp80,5 T atau 44,5% dari target APBN 2011, Belanja Barang mencapai Rp34,9 T (25,3%), Belanja Modal mencapai Rp22,8T (16,8%), dan Bantuan sosial mencapai Rp12,1 T (19,1%).
 - Pembayaran bunga utang mencapai Rp46,7 T (40,5% dari target) yang lebih tinggi dari tahun 2010 akibat perubahan stok utang.
 - Belanja subsidi mencapai Rp62,0 T (33,0% dari target) yang lebih tinggi dari tahun lalu terutama dipengaruhi kenaikan harga ICP dan kenaikan volume konsumsi BBM bersubsidi.
- Realisasi Transfer ke Daerah mencapai Rp182,5 T (46,4% dari target) yang lebih tinggi penyerapannya dari tahun 2010
3. Dengan realisasi pendapatan negara mencapai Rp497,0 T dan belanja negara mencapai Rp442,3 T, maka sampai dengan Juni 2011 pencapaian APBN 2011 menunjukkan surplus Rp54,7 T.

D. Kebijakan Insentif Fiskal Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Memproduksi Barang/Jasa Oleh Industri Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2011

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.011/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2011, Pemerintah telah menetapkan untuk memberikan insentif fiskal berupa Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) kepada industri sektor tertentu dengan berbagai kriteria, antara lain:

1. Industri Sektor tertentu memenuhi kriteria penilaian:
 - a. memenuhi penyediaan barang dan/atau jasa untuk kepentingan umum, dikonsumsi oleh masyarakat luas, dan/atau melindungi kepentingan konsumen;
 - b. meningkatkan daya saing;
 - c. meningkatkan penyerapan tenaga kerja; dan
 - d. meningkatkan pendapatan negara.
2. Atas impor barang dan bahan yang mendapatkan BMDTP memenuhi ketentuan:
 - a. barang dan bahan belum diproduksi di dalam negeri;
 - b. barang dan bahan sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau
 - c. barang dan bahan sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.
3. BMDTP tidak diberikan terhadap:
 - a. barang dan bahan yang dikenakan tarif umum bea masuk sebesar 0% (nol persen);
 - b. barang dan bahan yang dikenakan tarif bea masuk sebesar 0% (nol persen) berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional;
 - c. barang dan bahan yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping/Bea Masuk Anti Dumping Sementara, Bea Masuk Tindakan Pengamanan/Bea Masuk Tindakan

Pengamanan Sementara, Bea Masuk Imbalan, Atau Bea Masuk Tindakan Pembalasan;

- d. barang dan bahan yang diimpor ke dalam Kawasan Berikat menggunakan dokumen pemberitahuan pabean impor dengan mendapat penangguhan bea masuk dan pajak dalam rangka impor; atau
 - e. barang dan bahan yang diimpor dalam rangka pemanfaatan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor.
4. Permohonan untuk mendapatkan BMDTP telah diajukan oleh Pembina Sektor Industri kepada Menteri Keuangan dengan melampirkan:
- a. analisis dan alasan perlunya industri sektor tertentu diberikan BMDTP;
 - b. daftar barang dan bahan dengan uraian spesifikasi teknis; dan
 - c. usulan pagu anggaran BMDTP untuk Tahun Anggaran 2011.

Dengan berpedoman kepada PMK Nomor 261/PMK.011/2010 dan dalam rangka efisiensi pengeluaran anggaran dalam APBN 2011, maka penetapan pagu anggaran BMDTP untuk masing-masing sektor disesuaikan dengan jangka waktu realisasi impor yang tersedia pada tahun anggaran 2011 ini. Sehingga 16 (enam belas) sektor-sektor tertentu yang memperoleh fasilitas/insentif fiskal BMDTP dan pagu anggaran yang disetujui dapat dilihat seperti pada tabel berikut ini :

No	PMK	Sektor Industri	Pagu Yang Disetujui (Rp)	Kuasa Pengguna Anggaran
1	103/PMK.011/2011	Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar dan/atau Perakitan Alat Besar Oleh Industri Alat Besar	57.467.500.000	Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
2	104/PMK.011/2011	Pembuatan Boiler dan/atau Transformator Untuk Pembangkit Tenaga Listrik	3.446.000.000	Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
3	105/PMK.011/2011	Pembuatan Alat Tulis Berupa Ballpoint	880.000.000	Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur
4	106/PMK.011/2011	Pembuatan Karpet dan/atau Permadani	9.056.000.000	Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur
5	107/PMK.011/2011	Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor	106.136.500.000	Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
6	108/PMK.011/2011	Pembuatan dan Perbaikan Gerbong Barang, Kereta Penumpang, Kereta Rel Listrik/ Diesel, Bogie dan Komponen Kereta Api	6.192.500.000	Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

No	PMK	Sektor Industri	Pagu Yang Disetujui (Rp)	Kuasa Pengguna Anggaran
7	109/PMK.011/2011	Pembuatan dan/atau Perbaikan Kapal	20.042.500.000	Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
8	110/PMK.011/2011	Pembuatan Komponen dan/atau Produk Elektronika	12.500.000.000	Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
9	111/PMK.011/2011	Pembuatan Kabel Serat Optik	5.350.000.000	Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
10	112/PMK.011/2011	Pembuatan Peralatan Telekomunikasi	6.450.000.000	Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
11	113/PMK.011/2011	Pembuatan Tinta Khusus (Toner)	337.500.000	Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
12	114/PMK.011/2011	Pembuatan Kemasan Plastik, Plastik Lembaran, Biaxially Oriented Poly Propylene Film, Cast Poly Propylene Film, Karung Plastik, Benang Dari Plastik, Terpal Plastik, Geotekstil, Barang dan/atau Perabot Rumah Tangga Dari Plastik	49.267.500.000	Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur
13	115/PMK.011/2011	Pembuatan Resin Berupa Alkyd Resin, Unsaturated Polyester Resin, Amino Resin, Pigment Phthalate, Solution Acrylic/ Synthetic Latex, Plasticizer	7.734.000.000	Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur
14	116/PMK.011/2011	Pembuatan Sorbitol	385.500.000	Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur
15	117/PMK.011/2011	Perbaikan dan/atau Pemeliharaan Pesawat Terbang	38.034.000.000	Direktur Jenderal Perhubungan Udara
16	118/PMK.011/2011	Pembuatan Kemasan Infus	1.840.000.000	Badan Pengawas Obat dan Makanan

No	PMK	Sektor Industri	Pagu Yang Disetujui (Rp)	Kuasa Pengguna Anggaran
JUMLAH			325.119.500.000	

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap perusahaan yang memperoleh fasilitas/insentif fiskal BMDTP, terdapat beberapa perusahaan yang masih belum memenuhi kriteria formalitas kepatuhan perpajakan untuk beberapa sektor industri. Sehingga dirasa perlu untuk mempertimbangkan kepatuhan perpajakan bagi perusahaan yang telah memperoleh fasilitas/insentif fiskal BMDTP ini. Oleh karenanya pemberian BMDTP untuk sektor-sektor tertentu pada tahun anggaran 2011 ini relatif lebih tertib dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, meskipun hal tersebut berdampak pada agak mundurnya penerbitan PMK BMDTP per sektor industri.

Konsekuensi logis atas waktu realisasi impor dengan insentif fiskal BMDTP yang relatif singkat, yaitu hanya sekitar 5 (lima) bulan ke depan hingga akhir Desember 2011, maka diharapkan insentif fiskal ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para pelaku usaha di masing-masing sektor.

Akhirnya, agar pemanfaatan BMDTP ini dapat berlangsung secara optimal, perlu kerja sama bagi industri untuk merealisasikan dengan segera mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan dilampiri Rencana Impor Barang yang telah disetujui dan ditandatangani oleh masing-masing Pembina Sektor (Kuasa Pengguna Anggaran).